



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JALALUDDIN
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 672511

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.820.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 490 m2/144 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 5510 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, WARISAN Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 4894 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, WARISAN Rp. 345.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX 2 5 G DC (4X4) MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 134.553.326

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.039.553.326

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.039.553.326

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.